



**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KOTA PALOPO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah ,segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2020 ini dapat disusun.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini disusun sebagai tolak ukur keberhasilan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2020, dan akan jadi pedoman bagi seluruh aparat Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam melaksanakan tugasnya di bidang Perhubungan untuk Tahun 2020

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini untuk itu kami mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2020 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Perhubungan Kota Palopo.

Wassalamu'alaikum wr,wb.

Palopo, Juni 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



Andi Farid Baso Rachim,AP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19760419 199412 1

001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang 1
1.2 .	Landasan Hukum 2
1.3.	Maksud dan Tujuan 3
1.4.	Sistimatika Penulisan 4
BAB. II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12
2.3.	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 18
BAB. III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1.	Telahan terhadap Program Nasional dan Provinsi 29
3.2.	Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah 30
3.3	Program dan Kegiatan 31
BAB. IV.	PENUTUP

BAB.I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah merupakan perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai sebuah dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan.

Renja Perangkat daerah disusun oleh masing – masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Belanja dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk itu, dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi dokumen perencanaan, maka sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Palopo yaitu melaksanakan pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2020.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja OPD pada Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

- antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi ,Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012 -2032;
 14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Pemerintah Kota Palopo Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Palopo ;
 16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2023;
 17. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi ,Kedudukan ,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2016;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 ini adalah menyediakan arah acuan bagi Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan sebagai dokumen perencanaan adalah agar terdapat sinerginitas dan kontinuitas dalam perencanaan program dan kegiatan di Kota Palopo

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2020 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB.IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh OPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Perhubungan Tahun 2018 - 2023 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan bagi OPD. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Palopo sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada pencapaian indikator keberhasilan suatu program dan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan secara menyeluruh yang dikaitkan dengan indikator tersebut.

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palopo, Dinas Perhubungan Kota Palopo mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di Dinas perhubungan, Kota Palopo;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Dinas perhubungan, Kota Palopo;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Dinas perhubungan, Kota Palopo;
- 4) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah/swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas di Dinas perhubungan, Kota Palopo;
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

➤ **Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Dinas perhubungan Tahun 2019**

Hasil evaluasi terhadap target Renja Tahun 2019 dan Realisasi Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kota palopo.

Pada urusan wajib Dinas perhubungan Kota Palopo Tahun 2019 pada umumnya Realisasi program/kegiatan tahun 2019 memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dana APBD Tahun Anggaran 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.053.723.000 dan Realisasi sebesar Rp. 7.893.830.679 atau 98,01 %

- Belanja Tidak Langsung Rp. 5.417.123.000 Realisasi sebesar Rp. 5.262.801.049 atau 97,15 %
- Belanja Langsung Rp. 2.636.600.000 realisasi sebesar Rp. 2.631.029.630 atau 99,79 %

Terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

- Program/kegiatan yang melebihi target kinerja ada 10 kegiatan hasil/keluaran yang direncanakan ($\geq 100\%$)
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Mencapai realisasi 133,73 % melebihi dari target karena adanya biaya pengiriman atau paket yang meningkat dan biaya alat tulis kantor dan foto copy yang meningkat dari tahun sebelumnya.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional melebihi dari target sebesar 258,82% kerana adanya penambahan kendaraan dinas operasional Bus.
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan realisasi sebesar 102,23 % melebihi target karena danya penambahan tenaga administrasi
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah realisasi sebesar 138,12 % melebihi dari target renstra karena adanya peningkatan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar provinsi.
 - Pengadaan peralatan gedung kantor realisasi sebesar 148,67 % melebihi target karena adanya penambahan peralatan gedung kantor Printer, Komputer PC dan alat kantor lainnya.
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor realisasi sebesar 110,53 melebihi target karena adanya penambahan pemeliharaan gedung kantor

pada 3 bangunan kantor yang membutuhkan pemeliharaan yaitu, kantor dinas perhubungan, terminal dan UPTD PKB.

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor realisasi sebesar 151,71 % meningkat karena adanya penambahan Pemeliharaan Perlengkapan gedung Kantor AC.
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor realisasi sebesar 407,29 % melebihi target karena adanya beberapa penambahan peralatan gedung kantor yang membutuhkan pemeliharaan.
 - Peningkatan Pengendalian Ketertiban Pengguna Jalan realisasi sebesar 101,96 melebihi target Karena adanya peningkatan pegawai yang bertugas dalam pengendalian ketertiban di jalan.
 - Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan realisasi sebesar 106,57 % meningkat karena Jumlah rambu yang mengalami perbaikan / perubahan jalur 50 Rambu.
- Dinas perhubungan Kota palopo menyadari bahwa masih ada kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada tahun 2019 ada 10 (Sepuluh) kegiatan yang tidak memenuhi target ($\leq 90\%$) yaitu :

- Pengadaan Perlengkapan gedung kantor realisasi 72,54%
- Pengadaan Mebeleur Realisasi 49,30 %
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Realisasi 81,95 %
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional realisasi 86,46 %
- Pendidikan dan Pelatihan Formal relisasi 82,45 %
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD realisasi 10 %
- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran realisasi 10 %
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun realisasi 10 %
- Kegiatan peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor realisasi 88,77 %

- Kegiatan pengamanan dan keselamatan lalu lintas laut laik layar realisasi 78,54 %

Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Untuk capaian Kinerja pada tahun Berjalan 2020 kami perkirakan Bahwa Pelaksanaan Program/ Kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja tahun 2020 belum dapat dikaitkan pencapaian terget pencapaian kinerja tahunan dalam rencana strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Palopo periode 2019-2023, dikarenakan rencana kerja 2020 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2019 dan Pencapaian RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Palopo sampai dengan tahun 2020.

Evaluasi terhadap hasil RENJA Dinas Perhubungan Kota Palopo dengan capaian kinerja anggaran Renstra Dinas Perhubungan. Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi dinas perhubungan Kota Palopo di dukung oleh 5 Program yang mana target kinerjanya telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, target kinerja program yang telah tercapai meliputi :

1. Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan urusan yang terdiri dari 21 Kegiatan dimana capaian kinerja sudah mencapai target dengan realisasi fisik 100 %
2. Program Pelaporan Kinerja dan keuangan terdiri dari 3 kegiatan dimana capaian kinerja telah mencapai target
3. Program peningkatan pelayanan Angkutan terdiri dari 7 Kegiatan dan capaian kinerja realisasi anggaran renstra telah mencapai target sesuai dengan yang direncanakan.
4. Program pembangunan rehabilitasi / pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan terdiri dari 3 kegiatan dimana capaian kinerja anggaran renstra telah mencapai target sesuai dengan yang di rencanakan.
5. Program peningkatan pelayanan dan pengamanan lalulintas terdiri dari 2 kegiatan.

Terpenuhinya Realisasi Program / Kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan karena adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/ kegiatan dapat di capai sesuai harapan. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program / kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia. Dan Adanya sumberdaya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kota Palopo Tahun 2018 yang selaras dengan pencapaian target masing2 kegiatan.

(Tabel 2.1 sebagaimana format terlampir)

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD PEMERINTAH KOTA PALOPO

RENJA DINAS PERHUBUNGAN

Tahun 2020

NO	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2018-2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat daerah s/d Renja Perangkat Dearah (n-2) / (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat daerah Tahun berjalan (Thn n-1) 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100%		15
		URUSAN WAJIB																						
		DINAS PERHUBUNGAN																						
I		Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur dan Kapasitas SDM Aparatur		3,733,000,000		5,336,604,147		651,000,000		159,230,895		94,269,670					253,500,565		5,570,104,712				
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar	5 thn	130,384,000	5	225,425,630	12	25,096,000	3	16,470,750	3	3,091,000					6	19,561,750	11	244,987,380	220	188	DISHUB
2		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Disediakan Sumber Daya Air dan Listrik	5 thn	317,700,000	5	316,246,997	12	63,540,000	3	17,305,475	3	15,535,209					6	32,840,684	11	349,087,681	220	110	DISHUB
3		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan yang di bayarkan surat-suratnya	5 thn	81,250,000	5	69,537,245	12	16,250,000	3	444,850	3	4,755,900					6	5,200,750	11	74,737,995	220	92	DISHUB
4		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga ADM keuangan	5 thn	440,484,000	5	682,089,000	12	85,628,000	3	15,625,000	3	7,525,000					6	23,150,000	11	705,239,000	220	160	DISHUB

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		15
5		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Kantor yang di bersihkan	5 thn	210,000,000	5	137,199,500	12	40,000,000	3	8,134,900	3	11,871,500					6	20,006,400	11	157,205,900	220	75	DISHUB
6		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Bangunan Gedung Kantor	Jumlah kantor yang di sediakan instalasi listriknya	5 thn	25,106,000	5	74,193,200	12	5,000,000	3	1,703,000	3	1,284,000					6	2,987,000	11	77,180,200	220	307	DISHUB
7		Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Jumlah Terbitan yang di sediakan	5 thn	26,400,000	5	33,250,000	12	5,280,000	3	1,200,000	3	2,080,000					6	3,280,000	11	36,530,000	220	138	DISHUB
8		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi	5 thn	755,700,000	5	1,326,474,135	12	150,000,000	3	39,733,226	3	4,613,760					6	44,346,986	11	1,370,821,121	220	181	DISHUB
9		Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah tenaga ADM umum	5 thn	691,000,000	5	712,486,500	12	138,200,000	3	21,850,000	3	21,600,000					6	43,450,000	11	755,936,500	220	109	DISHUB
10		Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang di sediakan	5 thn	150,000,000	5	206,557,000	12												5	206,557,000	100	138	DISHUB
11		Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 thn	47,500,000	5	121,215,000													5	121,215,000	100	255	DISHUB
12		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang diadakan	5 thn	70,600,000	5	216,682,600													5	216,682,600	100	307	DISHUB
13		Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan	5 thn	40,750,000	5	62,025,000													5	62,025,000	100	152	DISHUB
14		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	5 thn	91,258,000	5	227,011,798		16,006,000	3	5,726,000	3	3,941,500					6	9,667,500	11	236,679,298	220	259	DISHUB
15		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	5 thn	125,000,000	5	108,411,594	12	25,000,000	3	4,542,039	3	2,144,626					6	6,686,665	11	115,098,259	220	92	DISHUB

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		15	
16		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil operasional yang dipelihara	5	thn	220,500,000	5	226,188,812	12	40,000,000	3	21,622,655	3	11,427,175			6	33,049,830	11	259,238,642	220	118	DISHUB
17		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	5	thn	9,418,000	5	17,124,000	12	2,000,000	3	430,000		0			3	430,000	8	17,554,000	160	186	DISHUB
18		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Jumlah Peralatan yang dipelihara	5	thn	47,600,000	5	136,055,350	12	9,000,000	3	4,443,000	3	4,400,000			6	8,843,000	11	144,898,350	220	304	DISHUB
19		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianaya Mesin Absensi				5	20,000,000										5					DISHUB
20		Pengadaan Pakaian Dinas / Olahraga	Jumlah pakaian yang diadakan	5	thn	30,000,000	5	203,200,000	12								0	5	203,200,000	100	677	DISHUB	
21		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang ikut pelatihan	5	thn	222,350,000	5	215,230,786	12	30,000,000							0	5	215,230,786	100	97	DISHUB	
II		Program pelaporan kinerja dan keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah			21,800,000		152,653,000	12	5,000,000									152,653,000				DISHUB
1		Penyusunan Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah Laporan	5	thn	15,800,000	5	28,918,000	12	3,800,000	-	-				0			28,918,000	0	183	DISHUB	
2		Penyusunan Laporan Semesteran	Jumlah Laporan	5	thn	3,000,000	5	11,624,000	12	600,000	-	-				0			11,624,000	0	387	DISHUB	
3		Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Jumlah Laporan	5	thn	3,000,000	5	112,111,000	12	600,000	-	-				0			112,111,000	0	3,737	DISHUB	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		15
III		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum		5,411,320,000		6,354,941,500	12	965,000,000		170,450,000		261,822,000					0	6,787,213,500			DISHUB
1		Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Terciptanya Keamanan pengguna angkutan laut			5	211,350,000											5	211,350,000			DISHUB
2		Peningkatan pengendalian ketertiban pengguna jalan	Jumlah Kegiatan Pengendalian	5 thn	2,910,120,000	5	3,218,222,000	12	479,850,000	3	102,550,000	3	127,750,000			6	230,300,000	11	3,448,522,000	220	119	DISHUB
3		Pengelolaan terminal angkutan darat	Jumlah Penertiban didalam terminal	5 thn	1,334,700,000	5	1,530,142,000	12	251,850,000	3	39,900,000	3	54,702,000			6	94,602,000	11	1,624,744,000	220	122	DISHUB
4		Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan lingkungan terminal	terciptanya disiplin dan pemeliharaan kebersihan lingkungan lingk terminal			5	15,151,500									0	0	5	15,151,500			
5		Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Jumlah uji KIR angkutan umum	5 thn	467,500,000	5	960,100,000	12	93,500,000	3	10,000,000		52,370,000			3	62,370,000	8	1,022,470,000	160	219	DISHUB
6		Pengamanan dan keselamatan lalu lintas laut dan laik layar	Jumlah Kapal GT.7 yang di uji laik layar	5 thn	330,000,000	5	51,839,000	12	66,000,000	3	12,000,000		18,000,000			3	30,000,000	8	81,839,000	160	25	DISHUB
7		Pengembangan Sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Jumlah kebutuhan rambu	5 thn	369,000,000	5	368,137,000	12	73,800,000	3	6,000,000		9,000,000			3	15,000,000	8	383,137,000	160	104	DISHUB
IV		Program Pembangunan Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Orang)		228,000,000		430,989,895	12	26,000,000	3	9,379,000	3	3,473,000			6						DISHUB
1		Penyusunan kebijakan, norma standar dan prosedur bidang perhubungan	Jumlah dokumen	5 thn	81,000,000	5											0	5	0	100	0	DISHUB

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5*100%		15							
2		Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	5	thn	89,500,000	5	430,989,895	12	12,000,000	3	9,379,000	3	3,473,000			6	12,852,000	11	443,841,895	220	496	DISHUB						
3		Pengadaan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan	5	thn	57,500,000	5		12	14,000,000									0	0	0	DISHUB							
V		Program peningkatan Pelayanan dan Pengamanan Lalulintas				188,000,000		49,992,000	12	33,000,000												DISHUB							
1		Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu-rambu yang terpasang	5	thn	174,000,000	5	49,992,000	12	26,000,000								5	49,992,000	100	29	DISHUB							
2		Sosialisasi dan bimbingan keselamatan lalu lintas	Jumlah peserta sosialisasi	5	thn	14,000,000	5		12	7,000,000									0	0	0	DISHUB							
VI		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Transportasi							12	450,000,000												DISHUB							
1		Penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat (Situasional)	Jumlah rambu-rambu yang terpasang	5	thn	1,800,000,000	5		12	450,000,000												DISHUB							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		2,130,000,000		339,059,895		359,564,670		698,624,565					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																													
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																													

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Palopo berdasarkan indikator kinerja utama yang sudah ditentukan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2018–2023. Analisis Kinerja Pelayanan dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kota Palopo

No	Indikator	SPM/Stan dar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Arus Penumpang angkutan umum		700≤	696	700	715	757	1.327.055	1.323.604	1.323.252	1.305.120	
2	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum		1	122	445	575	755	1.411	1.381	1.381	1.375	
3	Jumlah Pelabuhan Laut		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	Jumlah Terminal Bis		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	Presentase Jumlah Angkutan Darat terhadap Jumlah Penumpang Angkt.Darat		50≤	50≤	50≤	50≤	50≤	1.452 / 1.327.055	1.415 / 1.323.252	1.395 / 1.305.120	1.3402 / 1.305.120	
6	Kepemilikan KIR Angkutan Umum		65≤	60≤	65≤	65≤	65≤	1.411	100.5	76.93	76.98	
7	Presentase Penyediaan Rambu – rambu yang diadakan terhadap jumlah rambu yang seharusnya ada		50≤	40	45	55	65	179 / 254	254 / 450	254 / 450	295 / 550	

Dalam proses pengukuran kinerja yang perlu di perhatikan adalah membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dinas perhubungan kota palopo dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja dinas perhubungan kota palopo tahun 2018 dan 2019 disajikan pada tabel berikut di bawah ini :

1. Arus Penumpang Angkutan Umum

Indikator ini menggambarkan kinerja operasional layanan angkutan umum yang ada di Kota Palopo. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum, Jumlah penumpang yang dimaksud merupakan jumlah penumpang yang terangkut oleh satu angkutan umum dalam satu hari (satuan dari jumlah penumpang adalah penumpang/angkutan/hari).

Indikator ini merupakan asalah satu dari beberapa parameter evaluasi kinerja sektor perhubungan. Semakin banyak jumlah arus penumpang yang terangkut, semakin mudahnya aksesibilitas sebuah wilayah.

Indikator ini mengurai besaran jumlah arus penumpang angkutan umum untuk masing-masing moda transportasi bis, kereta api, kapal laut, dan pesawat udara yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun dibagi dengan total Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah.

Tabel 2.1
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah arus keluar masuk penumpang angkutan umum dengan bis (Orang)	1.688.848	1.680.024	1.344.991	1.326.741	2.094.130
Jumlah arus keluar masuk penumpang angkutan umum dengan kapal laut (Orang)	769	122	445	314	
Jumlah total arus penumpang angkutan umum (Orang)	1.689.617	1.680146	1.345.436	1.327.055	2.094.130

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2015 dan 2019

Data ini menunjukan bahwa sepanjang tahun 2015-2018, jumlah penumpang yang keluar masuk di Kota Palopo menurun. Jika tahun 2015, ada sebanyak 1.689.617 juta orang dan Tahun 2019 sebanyak 1.323.604 penumpang angkutan umum. Salah satu faktor yang patut diduga menjadi penyebab

penurunan ini, adalah cukup banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi udara Ojek.

2. Rasio Ijin Trayek

Ijin trayek adalah ijin untuk mengangkut orang dan barang dengan kendaraan angkutan umum (bis atau mobil penumpang) pada jaringan trayek. Satu trayek biasanya dilayani puluhan armada angkutan umum. Trayek sendiri adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang/barang dengan mobil yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

Indikator ini memberikan gambaran cakupan pelayanan trayek angkutan umum dalam memenuhi kebutuhan penduduk Kota Palopo. Apakah jumlah trayek yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota Palopo sudah mampu melayani seluruh penduduk dalam mengakses wilayah di Kota Palopo menggunakan angkutan umum. Semakin tinggi nilai rasio indikator ini, semakin banyak masyarakat yang terlayani angkutan umum dan semakin mudah mengakses wilayah di Kota Palopo dengan angkutan umum.

Tabel .2.2
Rasio Ijin Trayek
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	Buah	3	3	3	4	4
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	168.894	172.916	176.907	202.483	202.204
C	Rasio	Per 100.000	2	2	2	2	2

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2015 dan 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019, dalam mengakses wilayah di Kota Palopo, hanya tersedia 4 trayek angkutan umum bagi 100.000 penduduk Kota Palopo. Dari perspektif layanan angkutan umum, masyarakat akan semakin kesulitan mengakses beberapa spot wilayah di Kota Palopo jika ingin menggunakan angkutan umum massal. Sebab jumlah penduduk akan cenderung terus bertambah. Meski demikian saat ini, Kota Palopo memiliki alternative transportasi umum lainnya misalnya taksi, dan layanan transportasi daring/internet sepeda motor.

3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Indikator ini menggambarkan partisipasi para pelaku usaha angkutan umum memenuhi standar kelayakan angkutan umum dari aspek keamanan dan kenyamanan serta kelaikan operasional kendaraan nya. Semakin tinggi angka indikator ini, maka semakin banyak angkutan umum yang laik dan aman untuk diakses oleh publik.

Tabel .2.3
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit)	1.354	1.301	1.152	3.362	2.608

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2015 dan 2019

4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Indikator ini menggambarkan jumlah sentra pelayanan transportasi dan perhubungan masyarakat atau publik yang ada di Kota Palopo. Semakin beragam jumlah sentra atau pusat pelayanan transportasi publik, maka semakin tinggi aksesibilitas sebuah wilayah dijangkau oleh masyarakat.

Tabel .2.4
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah pelabuhan laut	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah terminal bis	Unit	1	1	1	1	1

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2015 dan 2019

5. Persentase Layanan Angkutan Darat

Indikator yang menunjukkan seberapa besar kemampuan layanan angkutan transportasi darat yang tersedia untuk memenuhi atau mencakup kebutuhan transportasi darat atau penumpang yang ada. Semakin tinggi angka indikator ini, semakin tinggi kemampuan layanan angkutan darat di Kota Palopo.

Tabel 2.5
Persentase Layanan Angkutan Darat
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah angkutan darat	Unit	1.524	1.441	1.332	3.223	3.396
b.	Jumlah penumpang angkutan darat	Orang	1.688.848	1.680.024	1.344.991	1.936.728	2.094.130
Persentase Per 10.000 Penumpang		%	0,090 %	0,085%	0,099%	0,166%	0.162 %
			9,02	8,5	9,9	16,6	16,2

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2018 dan 2019

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019, untuk melayani 10.000 penumpang angkutan darat di Kota Palopo hanya tersedia 15,3 unit angkutan darat. Kondisi menunjukan dimana untuk 10.000 penumpang angkutan darat hanya tersedia 15 unit angkutan darat.

Dan pada tahun 2019, 1 unit angkutan darat hanya melayani kurang lebih 935 orang penumpang .

6. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Indikator yang menggambarkan seberapa besar kedisiplinan para pelaku usaha angkutan umum memenuhi standar kelayakan angkutan umum dari aspek keamanan dan kenyamanan serta kelaikan operasional kendaraan nya. Semakin tinggi angka indikator ini, maka semakin banyak angkutan umum yang laik dan aman untuk diakses oleh publik.

Tabel .2.6
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada tahun n	Unit	170	140	180	486	788
b.	Jumlah angkutan umum pada tahun n	Unit	1.524	1.441	1.332	3.223	3.396
Persentase		%	11,15	9,71	13,51	15,07	23,20

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2015 dan 2019

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 dari 100 angkutan umum yang beroperasi di Kota Palopo hanya 1 kendaraan yang tidak memiliki KIR, artinya ada sebanyak 1.381 kendaraan yang sudah memiliki KIR.. Artinya kepemilikan KIR yang mengindikasikan kelayakan dan keamanan angkutan

umum semakin baik. Sehingga ke depan angka persentase yang menjadi target indikator ini harus semakin naik.

7. Pemasangan Rambu – Rambu

Indikator ini menggambarkan tingkat pengamanan jalan raya bagi pengguna jalan yang tersedia melalui pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Semakin panjang jalan yang menggunakan rambu, maka semakin besar tingkat pengamanan jalan raya yang tersedia.

Tabel .2.7
Persentase Pemasangan Rambu - Rambu
Kota Palopo Tahun 2015- 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah pemasangan rambu – rambu pada tahun n	Buah	142	144	158	179	23
b.	Jumlah rambu – rambu yang seharusnya tersedia	Buah	205	220	250	254	50
Persentase		%	62,27	65,45	63,20	70,47	46

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2015 dan 2019

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019, pemenuhan kebutuhan rambu lalu lintas hanya 46,4%, kondisi ini masih jauh dari harapan yaitu 450 buah. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa tingkat pengamanan jalan raya bagi pengguna jalan di Kota Palopo sesuai yang diharapkan.

8. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Indikator ini menggambarkan tingkat kepadatan jalan oleh kendaraan per km jalan. Semakin tinggi angka indikator ini, semakin padat kondisi jalan raya yang ada di Kota Palopo.

Tabel .2.8
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Panjang jalan	Km	502	502	503,16	503.16	503,16
b.	Jumlah kendaraan	Unit	25.743	26.846	25.587	42.880	38.167
Rasio		Angka	0.020	0,019	0,018	0.011	0,013
Rasio		Per 1000	20	19	18	11	13

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2015 dan 2019

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019, tingkat kepadatan jalan per Km terdapat 16 kendaraan, Artinya kondisi jalan di Kota Palopo pada tahun 2019 masih normal atau mengalami kepadatan.

9. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun

Indikator ini menggambarkan besaran pemanfaatan sentra pelayanan transportasi dan perhubungan masyarakat atau publik yang ada di Kota Palopo. Semakin tinggi angka indikator ini, menunjukkan semakin banyaknya orang dan lalu lintas barang yang keluar dan masuk ke Kota Palopo dalam satu tahun. Ini menunjukkan semakin terbukanya sebuah daerah dan meningkatnya aksesibilitas wilayah terhadap daerah lain.

Tabel .2.9
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah orang melalui terminal per tahun (orang)	1.688.848	1.680.024	1.344.991	1.326.741	1.323.252

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2015 dan 2019

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelaksanaan pembangunan dewasa ini disatu sisi berdampak positif dan negatif bagi perkembangan kehidupan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, perlu memperhatikan isu yang berkembang di tengah masyarakat dewasa ini. Isu yang berkembang ini dapat dijadikan pijakan dalam menentukan arah kebijakan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Berikut ini rumusan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan:

- 1) Angka dan tingkat fatalitas kecelakaan relatif cukup tinggi yang tersebar pada *blackspot* di beberapa jalan utama Kota Palopo dengan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah kurangnya prasarana kelengkapan LLAJ;
- 2) Sarana transportasi yang laik jalan untuk menjamin terselenggaranya LLAJ yang selamat dan nyaman;
- 3) Penyelenggaraan angkutan umum terkait dengan rehabilitasi

prasarana LLAJ yaitu pemeliharaan fasilitas utama dan penunjang terminal orang dan/atau barang serta kemudahan dalam pelayanan perijinanangkutan;

- 4) Transportasi darat salah satu penyumbang terbesar dalam fenomena perusakan lingkungan yaitu dari sisi kualitas udara yang semakin buruk sehingga perlu diperketat dalam pengontrolan emisi gas buang kendaraan bermotor secara berkala sebagai wujud kontribusi transportasi darat dalam pelestarian lingkunganhidup
- 5) Ketersediaan infrastruktur jaringan internal pemerintah daerah dan akses publik sampai ke tingkat kecamatan dan desa untuk terwujudnya e-government di Kota Palopo;
- 6) Keterbukaan informasi publik yang diukur dari penyampaian/publikasi mengenai kebijakan dan pembangunan pemerintahan daerah melalui website Kota Palopo penyajian yang cepat, akurat dan informatif, serta inovatif;
- 7) Perkembangan teknologi Kota Palopo yang sangat pesat menuntut adanya suatu kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan, pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif terhadap akses Kota Palopo dan dalam pameran pembangunan.

Perumusan isu-isu strategis terkait dengan dinamika lingkungan strategis Institusi Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 19 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas Kota Palopo dan Peraturan Walikota Palopo nomor 39 tahun 2018 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Palopo, serta berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan, dinamika isu atau kebijakan yang berkembang di lingkungan internasional, nasional, propinsi maupun di Kota Palopo, maka Dinas Perhubungan Kota Palopo merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kapasitas Sumberdaya Manusia aparatur serta sebaran tenaga yang memiliki kemampuan professional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
2. Fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih terjadi kecelakaan lalu lintas.

3. Kondisi terminal kurang memenuhi persyaratan pelayanan angkutan yang di indikasikan dengan kurang tersedianya lahan sesuai pelayanan dan adanya aksesibilitas dari dan ke Terminal yang masih terhambat oleh aktivitas lain.
4. Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi sebagai akibat mudahnya memperoleh fasilitas kredit dan menurunnya kualitas, kuantitas sarana dan prasarana transportasi publik yang berdampak munculnya daerah rawan kemacetan ;
5. Sumber daya manusia yang mempunyai basic pengetahuan di bidang transportasi dan kelalu lintasan jumlah dan kualitasnya belum mencukupi.
6. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pelaksanaan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan serta pelayanan publik ;
7. Kepatuhan masyarakat terhadap Undang – Undang Lalu lintas belum membudaya sehingga masih harus selalu dikembangkan dan diawasi.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi yang menjadi perhatian, karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

BAB. III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2018-2023 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2018-2023. Kebijakan dan strategi gan juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan yang menjadi salah satu alur logis peencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan.

Dalam menjabarkan sasaran nasional, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembanguan pada Unit Kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo. Pemikiran di atas sebagai dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari Rencana Strategi Kementerian Perhubungan

Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Perhubungan yang berkorelasi pada sasaran Kementerian perhubungan yang telah disusun sebelumnya. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan dikelompokkan menjadi 3 aspek :

1. Keselamatan dan Keamanan

Keselamatan dan Keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu menurunnya angka kecelakaan transportasi, dan menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi

2. Pelayanan Transportasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transporatasi ditetapkan 7 sasaran yaitu :

a. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi

- b. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Meningkatkan kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan
 - d. Meningkatkan Kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance.
 - e. Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan
 - f. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi
 - g. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance.
3. Kapasitas Transportasi
- Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran :
- a. Meningkatkan Kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan system transportasi antarmoda dan multimoda
 - b. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang
 - c. Meningkatnya layanan transportasi didaerah rawan bencana, perbatasan, tertular, terpecil dan khususnya di wilayah timur Indonesia
 - d. Meningkatnya pelayanan angkutan umum missal perkotaan.
 - e. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, visi dalam RPJMD ini diartikan sebagai gambaran tentang kondisi Kota Palopo yang diharapkan terwujud/tercapai pada akhir periode 2018-2023. Substansi utama dari visi ini adalah rumusan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penjelasan visinya dijabarkan sesuai sistem perencanaan pembangunan daerah. Visi Walikota dan Wakil Walikota adalah :

“Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Maju ,Inovatif dan Berkelanjutan”.

Dinas Perhubungan Kota Palopo sebagai salah satu bentuk

dukungan di bidang transportasi sesuai dengan tupoksi untuk ikut mensukseskan visi tersebut. Sesuai dengan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Palopo ***“Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan”*** maka salah satu tugas Dinas Perhubungan Kota Palopo yang terkait dengan visi Kota Palopo tersebut adalah ikut serta mewujudkan sistem transportasi Kota Palopo yang unggul, nyaman dan aman guna membantu masyarakat untuk lebih sejahtera, maju, inovatif dan berkelanjutan. Yang merupakan **Visi** Dinas Perhubungan Kota Palopo sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 -2023. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palopo, ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan :

- a. Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan tata kelola organisasi

b. Sasaran:

Sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Perhubungan dan Pelayanan Angkutan Jalan Raya.
2. Meningkatkan Aplikasi teknologi Informasi dan Layanan Angkutan.
3. Terciptanya Pengelolaan Administrasi yang berkualitas .

Untuk Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 ini kami belum dapat melakukan evaluasi Progres pencapaian tujuan dan sasaran dikarenakan realisasi pencapaian kinerja pada tahun 2020 rencana pertama masih sedang berlangsung, selain itu kami pun tidak melakukan penyesuaian target dikarenakan belum adanya perubahan kebijakan pengawasan ditingkat nasional.

Namun demikian target pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Palopo tahun 2020 kami rasa masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan Tujuan dan sasaran Tahun 2020 Faktor – faktor yang mungkin menjadi penghambat bagi terwujudnya visi dan misi Kota Palopo diantaranya :

1. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai dengan harapan masyarakat sehingga sulit untuk mendorong mereka kembali

menggunakan sarana angkutan umum agar dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi di jalan.

2. Tingkat kesadaran pengemudi angkutan umum masih rendah sehingga memberikan kontribusi dalam menambah kesemrawutan di jalan. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas sehingga sebagian besar kecelakaan terjadi karena faktor kelalaian pengemudi.

3.3 Program Dan Kegiatan.

Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan untuk mendukung tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan.

Rencana Kerja (RENJA)Perubahan merupakan Proses Penjabaran dari sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana kerja Pemerintah daerah (RKPD) Perubahan tahun 2020.

Dinas Perhubungan Kota Palopo yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap rencana kerja (RENJA) Perubahan tahun 2020 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin di capai indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Palopo, disamping itu juga dokumen rencana kerja Perubahan tahun 2020 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja, dan rencana capaiannya, melalui dokumen rencana kerja (renja) Perubahan ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Palopo.

Program dan kegiatan tahun 2020 yang telah diusulkan oleh Dinas Perhubungan Kota palopo rencana kerja (RENJA) Perubahan yang akan dilaksanakan tahun 2020 dinas perhubungan kota palopo adalah sebagai berikut :

(Lampiran Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2020)

**RINCIAN ANGGARAN PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Pagu Inikatif		Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Belanja Langsung				2.531.000.000	1.694.580.000	(836.420.000)	
2.09.01.01	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan				835,000,000.00	715,565,000.00	(119,435,000.00)	APBD Kota Palopo
2.09.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang keluar	950 surat	950 surat	37,000,000.00	36,000,000.00	(1,000,000.00)	APBD Kota Palopo
2.09.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Disediakan Sumber Daya Air dan listrik	3 Kantor	3 Kantor	68,000,000.00	68,000,000.00	-	APBD Kota Palopo
2.09.01.01.06	Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang di bayarkan STNK nya	16 kendaraan	16 kendaraan	15,000,000.00	8,500,000.00	(6,500,000.00)	APBD Kota Palopo
2.09.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga ADM Keuangan	11 org	8 org	70,000,000.00	59,350,000.00	(10,650,000.00)	APBD Kota Palopo
2.09.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Kantor yang di bersihkan	3 kantor	3 kantor	51,500,000.00	51,000,000.00	(500,000.00)	APBD Kota Palopo
2.09.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Bangunan Gedung Ktr	Jumlah Kantor yang disediakan instalasi Listriknya	3 kantor	3 kantor	5,000,000.00	5,000,000.00	-	APBD Kota Palopo
2.09.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Jumlah Terbitan yang disediakan	4 terbitan	4 terbitan	8,000,000.00	8,000,000.00	-	APBD Kota Palopo

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.09.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi	55 Kali	33 Kali	80,000,000.00	57,000,000.00	(23,000,000.00)	APBD Kota Palopo
2.09.01.01.53	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah Tenaga ADM Umum	26 orang	21 orang	135,000,000.00	122,000,000.00	(13,000,000.00)	APBD Kota Palopo
2.09.01.01.23	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan yang di adakan	1 Unit	1 Unit	175,000,000.00	175,000,000.00	-	APBD Kota Palopo
2.09.01.01.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Kantor yang diPelihara	3 Kantor	3 Kantor	30,000,000.00	26,000,000.00	(4,000,000.00)	APBD Kota Palopo
2.09.01.01.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	25,000,000.00	20,000,000.00	(5,000,000.00)	APBD Kota Palopo
2.09.01.01.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend.Dinas Operasional	Jumlah Kend.Dinas yang di pelihara	16 unit	16 unit	65,000,000.00	50,000,000.00	(15,000,000.00)	APBD Kota Palopo
2.09.01.01.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	8 Unit	4 Unit	3,500,000.00	1,215,000.00	(2.285,000.00)	APBD Kota Palopo
2.09.01.01.37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang di Pelihara	26 Unit	26 Unit	40,000,000.00	13,500,000.00	(26,500,000.00)	APBD Kota Palopo
2.09.01.01.50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang dididik/Pelatihan	2 orang	2 orang	27,000,000.00	15,000,000.00	(12,000,000.00)	APBD Kota Palopo

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.09.01.02	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah			6,000,000.00	1,500,000.00	(4,500,000.00)	APBD Kota Palopo
2.09.01.02.01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan	1 Dok/Lap	1 Dok/Lap	3,800,000.00	500,000.00	(3,300,000.00)	APBD Kota Palopo
2.09.01.02.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen/Laporan	1 Dok/Lap	1 Dok/Lap	1.000,000.00	500,000.00	(500,000.00)	APBD Kota Palopo
2.09.01.02.03	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen /Laporan	1 Dok/Lap	1 Dok/Lap	1.200,000.00	500,000.00	(700,000.00)	APBD Kota Palopo
2.09.01.03	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum (%)			1,155,000,000.00	949,515,000.00	(205,485,000.00)	APBD Kota Palopo
2.09.01.03.01	Peningkatan Pengendalian Ketertiban Pengguna jalan	Jumlah Kegiatan Pengendalian	365 kali	193 kali	664,000,000.00	507,000,000.00	(157,000,000.00)	APBD Kota Palopo
2.09.01.03.02	Pengelolaan Terminal Angkutan darat	Jumlah Penertiban Dalam Terminal	281 kali	281 kali	258,000,000.00	220,000,000.00	(38,000,000.00)	APBD Kota Palopo
2.09.01.03.03	Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	2.000 unit	2.000 unit	120,000,000.00	114,515,000.00	(5,485,000.00)	APBD Kota Palopo
2.09.01.03.04	Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas Laut dan Laik Layar	Jumlah Kapal GT.7 kebawah yang diperiksa	79 kapal	79 kapal	73,000,000.00	72,000,000.00	(1,000,000.00)	APBD Kota Palopo
2.09.01.03.05	Pengembangan sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Jumlah Kebutuhan Rambu Lalu Lintas yang baru	110 rambu	110 rambu	40,000,000.00	36,000,000.00	(4,000,000.00)	APBD Kota Palopo

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.09.01.04	Program Pembangunan ,Rehabilitasi /Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah arus penumpang angkutan umum			45,000,000.00	28,000,000.00	(17,000,000.00)	APBD Kota Palopo
2.09.01.04.02	Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan	85 rambu	85 rambu	45,000,000.00	28,000,000.00	(17,000,000.00)	APBD Kota Palopo
2.09.01.05	Program Peningkatan Pelayanan dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Pemasangan Rambu-rambu (%)			40,000,000.00	0.00	(40,000,000.00)	APBD Kota Palopo
2.09.01.05.01	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Jumlah rambu rambu yang diadakan/terpasang	50 Rambu	50 Rambu	40,000,000.00	-	(40,000,000.00)	APBD Kota Palopo
2.09.01.06	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Transportasi	Persentase peningkatan sarana dan prasaran DAK bidang transporportasi			450,000,000.00	-	(450.000.000.00)	APBD Kota Palopo
2.09.01.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat (Kondisional)	Jumlah Rambu rambu yang terpasang	250 Rambu	250 Rambu	450,000,000.00	-	(450,000,000.00)	APBD Kota Palopo

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2020 ini merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Tahun 2020, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palopo Tahun 2020, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo.

Keberhasilan dari pelaksanaan program kegiatan ditentukan oleh aparat dalam memahami dan menyikapi rencana yang telah dituangkan dalam rencana Kerja (Renja) ini sebagai komitmen untuk mewujudkannya. Seluruh unsur penyelenggaraan Program, wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif. Selain itu perlu diupayakan untuk mencapai Sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan program

Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Akhirnya, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kota Palopo tahun 2020 ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALOPO
ANDI FARID BASO RACHIM, AP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.19760419 199412 1 001